

# PENGARUH LIBERALISASI EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

## *The Effect of Economic Liberalization on Income Inequality*

Ratna Christianingrum<sup>1</sup>

---

### **Abstract**

*This study aims to determine the impact of economic liberalization on income inequality in Indonesia. This study used sectoral FDI as an indicator of financial liberalization and net export as an indicator of trade liberalization. We also used the employment rate as an intermediate indicator. We used panel regression to analyze data. This study shows that sectoral FDI has a significant and positive effect on employment rate in primary and tertiary sector. But in the secondary sector, sectoral FDI has a significant and negative effect on employment rate, because of the SBTC phenome. Financial liberalization has an indirect effect on income inequality in Indonesia, because sectoral employment rate has a significant effect on income inequality. Trade liberalization also has a significant effect on income inequality.*

**Keywords:** *income inequality, liberalization, sectoral FDI*

---

## **1. Pendahuluan**

Globalisasi yang terjadi saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan perdagangan yang antar negara. Perbedaan kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun penguasaan teknologi mengharuskan setiap negara menjalin hubungan ekonomi. Perekonomian negara yang terhubung dengan negara lain disebut sebagai perekonomian terbuka. Negara dengan perekonomian terbuka merupakan negara yang melakukan kegiatan ekspor-impor barang atau jasa serta meminjam atau memberi pinjaman pada pasar modal dunia (Mankiw, 2007). Peneliti neoliberalisme ekonomi berpendapat bahwa globalisasi ekonomi akan mendorong kemakmuran. Hal ini menyebabkan banyak negara menganut paham ekonomi liberalis. Keterbukaan ekonomi serta finansial merupakan cara dalam mencapai peningkatan perekonomian suatu negara (Fatsabit & Yusran, 2019).

Bagi negara berkembang, liberalisasi ekonomi menimbulkan banyak konsekuensi. Dreher (2006) menyatakan bahwa keterbukaan ekonomi dapat menurunkan standar social dan lingkungan, meningkatnya tingkat kemiskinan pada negara berkembang dan meningkatnya krisis keuangan di suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daumal (2010) di Brazil dan India, diperoleh kesimpulan bahwa keterbukaan perdagangan dapat mengurangi ketimpangan regional. Keterbukaan perdagangan merupakan salah satu bentuk dari proses liberalisasi ekonomi. Selain itu Keterbukaan perdagangan juga mampu menurunkan ketimpangan di beberapa negara berkembang (Wood, 1994).

Banyak penelitian telah dilakukan di negara berkembang untuk melihat dampak liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan yang terjadi. Namun hingga saat ini belum diketahui secara jelas apakah liberalisasi ekonomi dapat meningkatkan ketimpangan, atau justru menurunkan

---

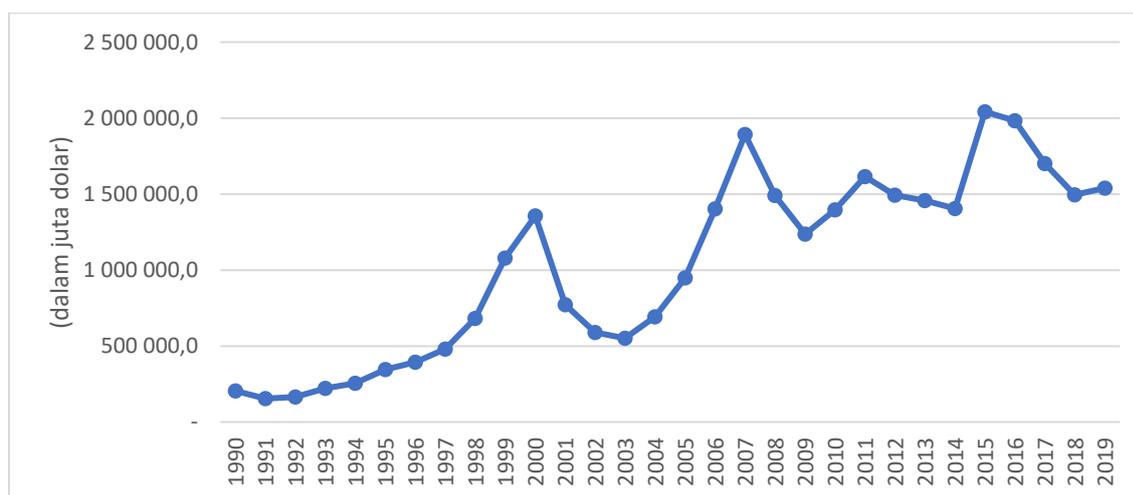
<sup>1</sup> Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Setjen DPR RI, ratna.christianingrum@dpr.go.id

ketimpangan yang terjadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wood (1994) diperoleh kesimpulan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi ketimpangan yang terjadi di negara-negara berkembang. Namun pada penelitian yang lain diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara peningkatan perdagangan dengan peningkatan ketimpangan (Meschi & Vivarelli, 2009) (Wood, 1994). Penelitian yang lain menyatakan bahwa finansial liberalisasi menjadi penggerak ketimpangan (Held, McGrew, Goldblatt, & Perraton, 1999).

Liberalisasi suatu perekonomian ditandai dengan meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi perekonomian suatu negara dapat tercapai apabila terjadi pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan dalam transaksi barang ataupun arus modal atau kapital antar negara. Untuk mendapatkan kondisi perdagangan suatu negara, maka dapat digunakan neraca perdagangan sebagai salah satu elemen liberalisasi ekonomi. Namun perlu diketahui bahwa liberalisasi tidak hanya transaksi barang atau jasa, namun juga terdapat perpindahan modal dari satu negara ke negara yang lain. Sehingga selain neraca perdagangan, maka Foreign Direct Investment (FDI) dalam menjadi elemen lain dari liberalisasi perekonomian (Boliaccini & Egan, 2017).

Berdasarkan laporan UN Conference on Trade and Development's World Investment, pada tahun 1990an rata-rata aliran FDI yang masuk sebesar 8,4 persen dari pembentuk modal tetap bruto. Namun nilai ini mengalami peningkatan pada dekade pertama abad 20 menjadi 12,4 persen (UNCTAD, 2012). Gambar 1 menunjukkan bahwa secara global aliran FDI menunjukkan fluktuasi, namun masih menunjukkan tren peningkatan sejak 1990 hingga 2019.

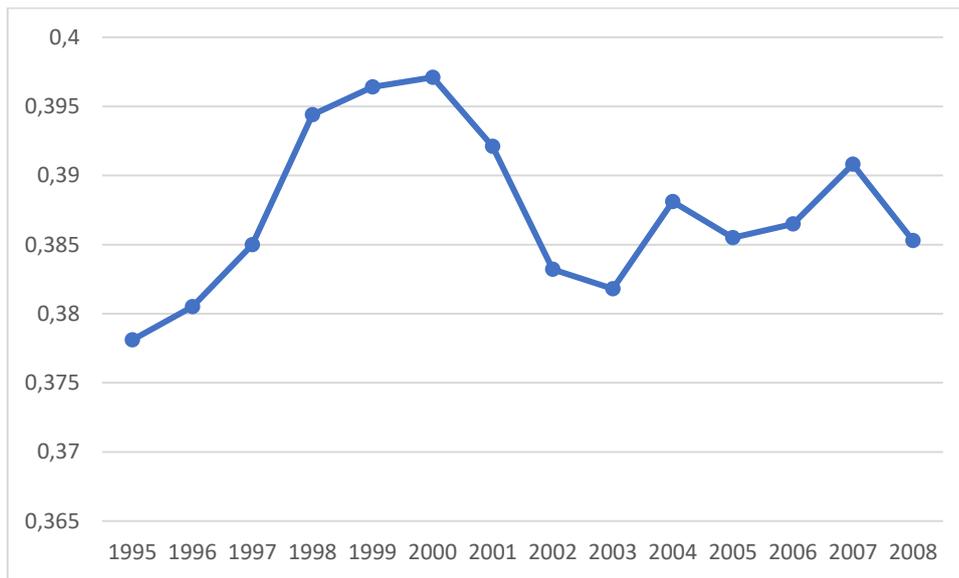
**Gambar 1. Perkembangan FDI *Inflow* Dunia**



Sumber: (UNCTAD, 2022), diolah

Pada periode yang sama, ketimpangan pendapatan juga mengalami peningkatan. Gambar 2 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan secara global menunjukkan tren meningkat, walaupun peningkatan yang terjadi tidak terlalu tajam.

**Gambar 2. Perkembangan Ketimpangan Pendapatan**

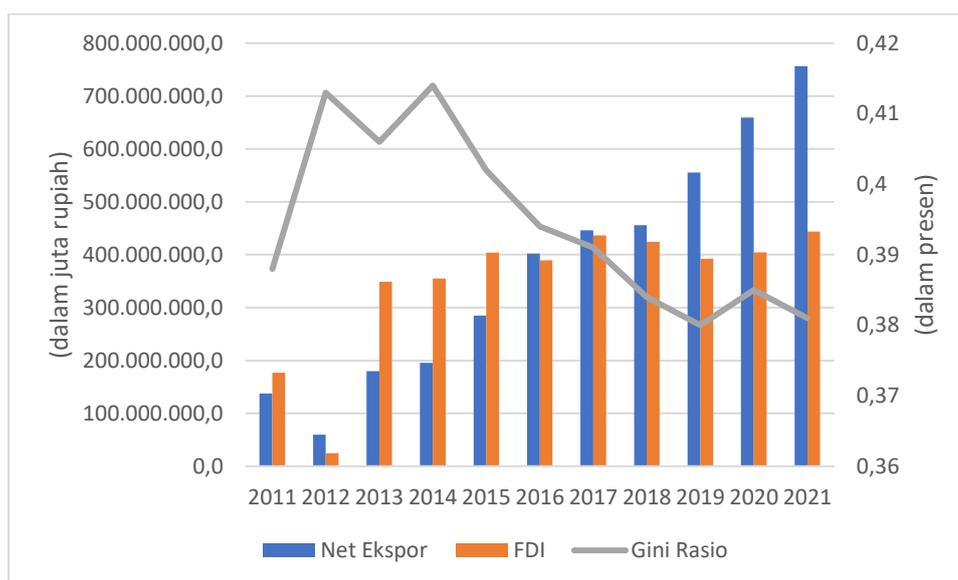


*Sumber: Word Inequality Database (2022), diolah*

Di negara berkembang proses liberalisasi dilakukan tidak hanya di bidang ekonomi, namun biasanya bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam melihat efek dari liberalisasi perdagangan yang dilakukan (Goldberg & Pavenik, 2007). Namun telah banyak penelitian yang dilakukan di negara berkembang baik secara teoritis ataupun empiris untuk melihat pengaruh atau hubungan antara FDI dengan ketimpangan. Reuveny dan Li (2003) serta Choi (2006) menemukan hubungan yang positif antara FDI dengan ketimpangan pendapatan. Mereka menggunakan analisis regresi panel dalam penelitian yang mereka lakukan. Sedangkan Jaumotte et.al (2013) melakukan investigasi di 51 negara dalam kurun waktu 23 tahun, dan memperoleh kesimpulan bahwa perdagangan mampu menurunkan ketimpangan pendapatan, namun adanya FDI justru meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan liberalisasi perdagangan. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pada awal orde baru yang bersifat liberal dan pro pasar. Beberapa penelitian telah dilakukan menunjukkan bahwa liberalisasi perekonomian berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat bahwa sejak penerapan liberalisasi perdagangan di ASEAN, volume perdagangan Indonesia mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Budiyantri (2017) yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun hal yang berbeda disampaikan oleh Wiguna et. al (2019) yang melakukan penelitian di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2006-2015. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota dalam provinsi-provinsi di Indonesia (Wiguna & Panennugi, 2019).

**Gambar 3. Perkembangan Net Ekspor, FDI dan Gini Ratio**



Sumber: BKPM, BPS (2022), diolah

Gambar 3 menunjukkan perkembangan Net ekspor, FDI dan gini rasio di Indonesia. Realisasi FDI dan net ekspor Indonesia menunjukkan fluktuasi, namun masih menunjukkan adanya tren peningkatan sejak tahun 2012. Pada periode yang sama, gini rasio Indonesia justru memperlihatkan tren penurunan. Sehingga dalam tulisan ini akan dilihat seberapa besar pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Alesina dan Rodrik (1994) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada hakikatnya distribusi pendapatan merupakan pengukuran dari kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan atau dengan kata lain pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi pendapatan di suatu daerah atau wilayah (Sukirno, 2013).

Menurut Arsyad (1999), ada delapan hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang yaitu 1) meningkatnya jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan per kapita, 2) terjadinya inflasi yang tidak diikuti dengan penambahan barang produksi,

3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, 4) investasi pada padat modal lebih banyak dibandingkan investasi padat karya sehingga menyebabkan pengangguran bertambah karena pendapatan yang diperoleh relatif kecil, 5) mobilitas social yang rendah, 6) berlakunya kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga barang hasil industri menjadi naik dengan tujuan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, 7) ketidakelastisan permintaan barang-barang ekspor menyebabkan turunnya nilai tukar (term off trade) bagi negara berkembang, 8) berkurangnya industri-industri rumah tangga yang mengakibatkan pendapatan menjadi berkurang.

## 2.2 Gini Rasio

Koefisien Gini atau Gini rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Koefisien Gini merupakan ukuran pemerataan pendapatan. Nilai koefisien Gini berada di antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka 0 maka daerah tersebut mengalami pemerataan. Sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan. Rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

GR : Koefisien Gini

$f_i$  : jumlah penerima pendapatan kelas ke-i (persen)

$Y_i$  : jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke-i (persen)

**Tabel 1. Ukuran Nilai Koefisien Gini**

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
>0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

## 2.3 FDI, Upah, dan Bias Keterampilan

Menurut Salim dan Sutrisno (2018) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian. Goldberg dan Pavenik (2007) mencatat bahwa peningkatan arus modal dari luar negeri secara umum dari waktu ke waktu berhubungan dengan peningkatan permintaan pekerja terampil. Barang modal yang ada seringkali memerlukan tambahan keterampilan pekerja. Feenstra dan Hanson (1997) berpedapat bahwa pasar tenaga kerja global meningkatkan permintaan pekerja terampil di baik negara maju ataupun negara berkembang. Pada proses produksi yang paling mendasar, walaupun berada di daerah dengan upah yang rendah, tetap memerlukan batas bawah kemampuan.

Apalagi jika perusahaan tersebut terhubung dengan rantai produksi dari perusahaan multinasional. Hal yang sama disampaikan oleh Rodrik (1998) bahwa liberalisasi perdagangan mempermudah perusahaan terhubung dengan proses produksi multinasional di negara berkembang untuk memperdagangkan pekerja tidak terampil dengan impor yang murah, untuk mengurangi permintaan relative tenaga tidak terampil. Hal ini karena liberalisasi ekonomi dan liberalisasi FDI sering dilakukan secara bersamaan. Dinamika ini memberikan kontribusi pada pola pengaruh FDI terhadap bias keterampilan di negara berkembang.

*Skill-biased technological change* (SBTC) juga meningkatkan keterampilan premium dan digunakan untuk menjelaskan ketimpangan di negara-negara berkembang. SBTC terjadi apabila sebuah teknologi melengkapi pekerja terampil dan menggantikan pekerja tidak terampil. Liberalisasi ekonomi mempermudah teknologi baru dari negara maju masuk ke negara-negara berkembang. Hal ini pasti akan berhubungan dengan peningkatan keterampilan pekerja dan peningkatan posisi relative dari pekerja terampil. Dalam kasus FDI, penggunaan teknologi dalam proses produksi di negara berkembang meningkatkan permintaan pekerja terampil dan mereka akan mendapatkan upah yang relative besar. Hal ini tentunya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan antara pekerja terampil dengan pekerja tidak terampil (Boliaccini & Egan, 2017). Liberalisasi menyebabkan peningkatan impor mesin dan Teknik dari negara maju. Harrison dan Hanson (1999) melakukan penelitian di Mexico dan menemukan dinamika bahwa perusahaan asing mempekerjakan pekerja terampil lebih banyak setelah adanya impor teknologi.

Banyak peneliti yang berpendapat bahwa liberalisasi capital tidak meningkatkan ketimpangan. Beberapa penelitian dilakukan dengan menghubungkan FDI dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan (Blomstrom, Kokko, & Zejan, 2000). Penelitian ini fokus terhap hubungan langsung antara FDI dengan ketimpangan pendapatan (melalui proses pertumbuhan ekonomi), bukan pada dampak menengah dari FDI terhadap tenaga kerja dan upah. Saat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dapat mengurangi ketimpangan, hubungan antara FDI dengan ketimpangan pendapatan bergantung secara langsung pada jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dan tingkat keterampilan dari pekerjanya, yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat upah yang diperoleh. Sedangkan model yang memprediksikan penurunan ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh FDI berdasarkan pada logika banyaknya pekerja dengan keterampilan rendah dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dan mereka mendapatkan upah yang lebih baik. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan relative terhadap pekerja dengan keterampilan rendah dalam perekonomian secara luas. Hal ini tentunya akan mengurangi ketimpangan. Meskipun ada banyak bukti bahwa perusahaan multinasional membayar upah lebih baik, namun kemauan untuk mereka menerima tenaga kerja berketerampilan rendah masih tidak pasti. Bias keterampilan yang ditimbulkan oleh SBTC dan kualifikasi lain yang melekat pada FDI di negara berkembang membuat kemungkinan besar FDI akan menargetkan pekerja dengan keterampilan tinggi. Perusahaan multinasional bergantung pada kepemilikan asset, sering kali dalam bentuk teknologi dan proses baru. Apalagi FDI di negara berkembang semakin diarahkan ke sektor jasa yang heterogeny. Hal ini lebih menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan daripada penurunan ketimpangan pendapatan.

Hubungan tidak langsung lainnya yang belum tereksplorasi antara FDI dan ketimpangan ialah hubungan melalui efek penerimaan tenaga kerja dan upah yang tinggi pada ketimpangan gender. Hal ini dikarenakan tenaga kerja perempuan telah mendorong pertumbuhan di sektor manufaktur dan jasa secara keseluruhan (Abramo & Valenzuela, 2005). Hal ini menjadi kunci peningkatan FDI di sektor ini. Pertumbuhan sektor jasa berketerampilan rendah dalam beberapa dekade terakhir menggambarkan ketidakadilan gender, dimana perempuan dibayar dengan upah yang lebih murah. Braunstein (2006) mencatat bahwa seiring dengan meningkatnya FDI, kesenjangan upah antar gender tidak akan menyusut. Hal ini dikarenakan perempuan terkonsentrasi di sektor manufaktur dan jasa ringan yang sangat kompetitif. Namun, efek positif dari bias upah dikarenakan gender pada ketimpangan pendapatan ialah adanya perpindahan pekerja perempuan dari sektor informal ke sektor formal. Di negara berkembang, ketimpangan pendapatan cenderung berkorelasi dengan peningkatan output yang dihasilkan di pasar informal (Rosser, Rosser, & Ahmed, 2003).

Secara umum hubungan antara FDI dengan tingkat upah yang tinggi berpotensi mendorong ketimpangan pendapatan ke dua arah. Jensen dan Rosas (2007) berpendapat bahwa upah yang tinggi meningkatkan upah dari pekerja manufaktur yang tidak terampil di negara berkembang. Hal ini menyebabkan mereka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi dibandingkan saat mereka bekerja di perusahaan domestik. Jika perusahaan multinasional membayar dengan upah yang lebih baik dan menargetkan pekerja dengan keterampilan yang tinggi, maka ketimpangan upah akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

#### **2.4 FDI Sektoral dan Ketimpangan**

Selama liberalisasi terjadi telah terjadi pergeseran pada komposisi sektor dari FDI. Setelah tahun 1990, bentuk-bentuk investasi ke negara-negara berkembang semakin beragam. Khususnya proporsi FDI di bidang jasa yang meningkat secara pesat. Pada tahun 1970, FDI di sektor jasa mencapai 25% dari total FDI di seluruh dunia. Di tahun 1990 komposisi ini meningkat menjadi sekitar 50% dari total FDI di seluruh dunia dan di tahun 2002 meningkat menjadi 60% (UNCTAD, 2004). Selama dua dekade terakhir, berbagai sub sektor jasa mengalami liberalisasi seperti listrik, air, telekomunikasi, dan bisnis jasa lainnya. Terdapat beberapa penyebab perubahan ini. Pertama, apabila perusahaan lokal dapat menyediakan jasa, maka perdagangan internasional bukan menjadi pilihan namun justru mendorong terjadinya FDI di sektor ini. Kedua, kebanyakan negara membuka industri jasa untuk investasi dari luar negeri selama periode 1990 hingga 2000. Perusahaan-perusahaan yang dulunya merupakan milik negara atau kepemilikan domestik yang terbatas sekarang dilelang ke investor asing. Ketiga, terjadinya perluasan pasar ke negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan kelas konsumen yang cukup pesat, mengimbangi permintaan FDI yang mulai berkurang di negara-negara kaya.

Terdapat beberapa alasan untuk mencurigai FDI di sektor jasa paling banyak meningkatkan ketimpangan dibandingkan investasi di sektor primer ataupun sekunder. Pertama ialah keragaman dari jenis sektor jasa. Evans dan Timberlake (1980 hal, 534) menjelaskan bahwa sektor tersier mencakup semua orang mulai dari dokter dan pengacara yang dibayar dengan upah yang tinggi hingga pembantu rumah tangga yang memiliki upah rendah. Pertumbuhan tersier di negara berkembang merupakan pertumbuhan sektor yang didistribusi pendapatannya relative lebih terpolarisasi. Mereka

melihat hal ini dikarenakan pertumbuhan modal asing yang meningkatkan jumlah pekerjaan di sektor tersier ini dan pada akhirnya meningkatkan ketimpangan.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa investasi di sektor jasa kelas atas seringkali melengkapi tenaga kerja berkeahlian tinggi, namun justru menggantikan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kaiser (2000) di Jerman, menunjukkan bahwa SBTC menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja dengan keterampilan rendah namun meningkatkan permintaan relatif terhadap tenaga kerja terampil. Hal ini banyak terjadi di sektor jasa yang sedang berkembang dengan pesat.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa perbedaan upah dari perusahaan asing di sektor jasa lebih besar dibandingkan di sektor manufaktur. Upah tinggi diberikan oleh perusahaan multinasional, namun mereka juga mensyaratkan keterampilan tinggi. TeVelde dan Morrissey (2004) melakukan penelitian di Asia Timur dan menyimpulkan bahwa FDI meningkatkan upah baik untuk tenaga kerja terampil ataupun tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Namun keuntungan bagi tenaga kerja terampil lebih besar. Sedangkan di Thailand, peneliti menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara FDI dengan ketimpangan upah. Hal ini dikarenakan SBTC di sektor tenaga kerja dengan keterampilan tinggi.

Walaupun terjadi upah rendah di sektor jasa, namun masih memungkinkan untuk terjadi peningkatan upah oleh keberadaan perusahaan multinasional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengurangan ketimpangan pendapatan bisa terjadi karena perusahaan multinasional membayar dengan upah yang lebih tinggi pada pekerja berkeahlian rendah. Model Heckscher-Ohlin memperkirakan peningkatan upah dari pekerja tidak terampil terjadi di negara berkembang. Namun ada perbedaan penting antara tenaga kerja berkeahlian rendah di industri manufaktur dengan industri jasa. Informalitas jauh lebih umum terjadi di sektor jasa dibandingkan dengan sektor manufaktur di negara berkembang (Fies, Fugazza, & Maloney, 2010). Hal ini dikarenakan apabila investor asing menciptakan lapangan kerja formal di sektor jasa, maka mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan bersih. Selain itu, FDI di layanan seperti hotel dan ritel sering menggantikan penyediaan layanan milik domestik yang ada sebelum proses liberalisasi. Seringkali mereka memaksa mantan karyawan perusahaan untuk menjadi tenaga kerja informal atau pengangguran.

Mosley (2011) berpendapat bahwa pelanggaran hak-hak buruh di negara-negara berkembang lebih mungkin terjadi dimana perusahaan multinasional bergantung pada subkontrak dan pengaturan kepemilikan jangka panjang lainnya. Jenis struktur kepemilikan seperti ini banyak terjadi di industri dengan keterampilan rendah. Sementara jenis investasi lainnya dapat menghasilkan siklus peningkatan keterampilan dan upah yang lebih baik, sektor dengan keterampilan rendah mungkin rentan terhadap berbagai hal yang negatif. Pertumbuhan upah yang lebih lambat terjadi di sektor jasa dengan keterampilan rendah, pertumbuhan upah yang lebih cepat di sektor jasa dengan keterampilan tinggi, dan pertumbuhan sektor jasa secara keseluruhan di negara berkembang menunjukkan adanya ketimpangan.

Hubungan antara FDI di sektor manufaktur dan ketimpangan juga belum jelas. Di sektor manufaktur, FDI merupakan penggerak utama dari adanya peningkatan teknologi. Upah di sektor ini meningkat seiring dengan peningkatan persyaratan dari keterampilan akibat penerapan teknologi tersebut (Leamer, Maul, Rodriguez, &

Schoott, 1999). Dengan alasan ini dapat diekspektasikan bahwa dampak dari FDI di sektor manufaktur memiliki dampak yang kecil terhadap ketimpangan. Dengan menggunakan proses Heckscher-Olin, Joumotte et.al (2013) melakukan penelitian di negara berkembang. Dia menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan meningkatkan pendapatan pekerja pertanian yang berketrampilan rendah. Namun pekerja di sektor primer baik sub sektor pertanian atau ekstraksi, kurang berhasil dalam mengamankan hak ekonomi dan politiknya di negara berkembang. Meskipun dapat diduga bahwa efek upah yang tinggi terhadap ketimpangan dapat terjadi di subsektor ekstraktif, namun efek tersebut tidak dapat terlihat karena tidak dilakukan perbedaan antara FDI pertanian dan ekstraktif.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1 Data**

Penelitian dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tahunan yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2021. Khusus Provinsi Kalimantan Utara, rentang waktu yang digunakan ialah dari tahun 2015 hingga 2021. Hal ini dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk di tahun 2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data realisasi FDI per sektor yang diperoleh dari BKPM. Dimana data realisasi FDI terbagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Data realisasi yang diperoleh dari BKPM memiliki satuan juta dolar. Namun data tersebut akan diubah ke dalam satuan juta rupiah. Adapun dalam proses transformasi digunakan nilai tengah dolar per tahunnya. Data nilai tengah kurs USD diperoleh dari BPS. Adapun asumsi yang digunakan ialah realisasi FDI terjadi bersamaan dengan berlakunya nilai tengah kurs dollar di tahun berjalan. Asumsi ini diperlukan karena data realisasi FDI akan disandingkan dengan nilai PDRB per provinsi. Seperti diketahui bahwa nilai PDRB memiliki satuan juta rupiah. Adapun variabel FDI sektoral yang akan digunakan merupakan proporsi realisasi FDI per sektor terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan penggunaan data rasio FDI terhadap PDRB dapat mengurangi dampak terjadinya pencilan (Boliaccini & Egan, 2017). Selain itu perlu dipertimbangkan penetrasi modal asing relative terhadap ukuran ekonomi negara. Variabel dependen yang digunakan merupakan persentase FDI sektoral terhadap PDRB.

Selain FDI sektoral, variabel dependen yang digunakan ialah proporsi net ekspor terhadap PDRB. Nilai ini digunakan untuk menggambarkan liberalisasi perdagangan. Nilai net ekspor diperoleh dari BPS. Nilai ini menggunakan satuan juta rupiah. Adapun variabel dependen yang digunakan merupakan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan ini didekati dengan menggunakan koefisien gini. Adapun data koefisien gini diperoleh dari BPS

#### **3.2 Metode Analisis Data**

Penelitian ini pada awalnya akan menggunakan pendekatan *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk mengetahui pengaruh liberalisasi ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi. Namun pada saat dilakukan uji root, diperoleh bahwa variabel FDI baik untuk sektor primer, sekunder ataupun tersier stasioner di level 0. Sedangkan variabel yang lain stasioner di level 1. Sehingga metode ARDL dianggap lebih tepat dibandingkan penggunaan panel VECM. Hal ini dikarenakan ARDL dapat digunakan saat variabel stasioner di level 0 ataupun level 1.

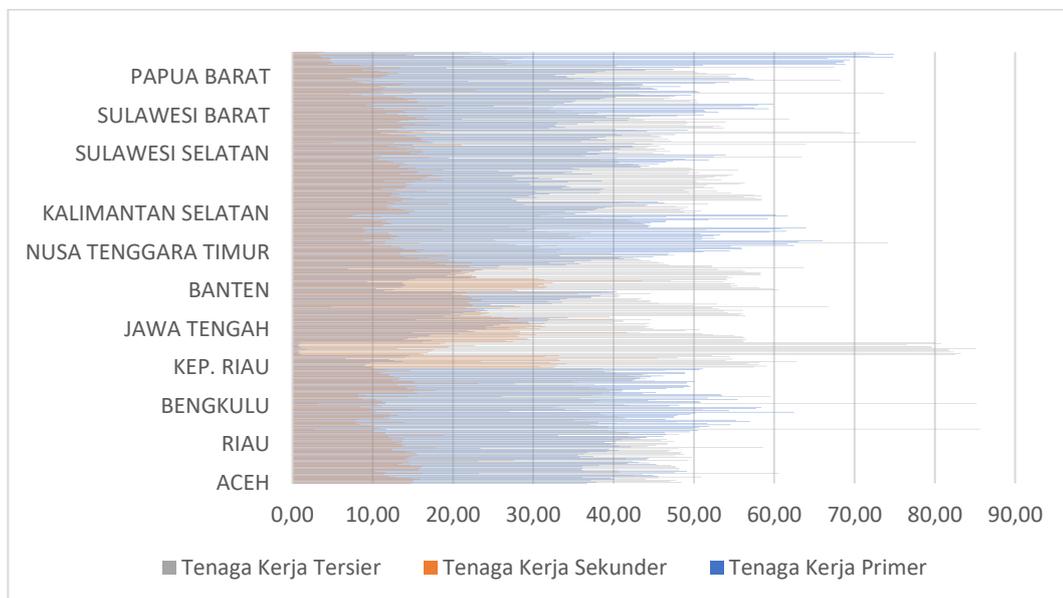
Namun pada saat dilakukan pengolahan data dengan menggunakan ARDL, diketahui bahwa data membentuk matrik nonsingular. Hal ini berarti bahwa data tersebut tidak dapat dianalisis dengan menggunakan ARDL. Sehingga pada tulisan ini data akan dianalisis dengan metode regresi panel. Adapun regresi panel dilakukan pada masing-masing sektor. Untuk masing-masing sektor, akan dilakukan regresi sebanyak 2 kali, dengan tujuan melihat pengaruh dari realisasi FDI terhadap penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Selanjutnya melihat pengaruh Bersama-sama antara FDI, tenaga kerja, dan net ekspor terhadap gini rasio di masing-masing sektor.

#### 4. Hasil Analisis dan Pembahasan

##### 4.1 FDI dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pola penyerapan tenaga kerja di Indonesia memiliki pola yang relatif sama dari tahun ke tahun, dimana sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor tersier. Gambar 5 menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor tersier dan hal ini terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia.

**Gambar 5. Perkembangan Rasio Tenaga Kerja di Indonesia per Sektor per Provinsi**



Sumber: BPS (2022), diolah

Apabila dilihat perbandingan jumlah penyerapan tenaga kerja per sektor, terjadi pergeseran jumlah penyerapan tenaga kerja dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor primer mencapai 40,79 juta jiwa. Nilai ini setara dengan 35 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun di tahun 2021 jumlah pekerja yang bekerja di sektor ini mengalami penurunan yang cukup berarti, menjadi 38,57 juta jiwa atau sebesar 29 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Namun hal yang berbeda terjadi di sektor sekunder dan tersier. Di sektor sekunder, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari 21,12 juta jiwa (18,39 persen) di tahun 2011 menjadi 27,84 juta jiwa (21,22 persen) di tahun 2021. Sedangkan di sektor tersier, penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan dari 52,93 juta jiwa (46,09 persen) di tahun 2011 menjadi 64,74 juta jiwa (49,36 persen) di tahun 2021.

Peubahan proporsi tenaga kerja, mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor lainnya.

Adapun perkembangan FDI selama 2011 hingga 2021 per sektor menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi FDI di Indonesia menacapai USD31,09 miliar. Nilai realisasi ini hampir mencapai 2 kali lipat realisasi FDI di Tahun 2011 yang hanya sebesar USD19,47miliar. Realisasi FDI di tahun 2021 didominasi oleh sektor sekunder, dimana realisasi FDI di sektor ini mencapai USD15,8 miliar (50,81 persen dari total realisasi di tahun 2021). Di tahun 2011 realisasi FDI tertinggi juga berada di sektor tersier dengan nilai investasi mencapai USD7,8 miliar (40,05 persen).

Model regresi yang diperoleh untuk melihat pengaruh realisasi FDI terhadap penyerapan tenaga kerja terdapat di tabel 2. Berdasarkan model yang terbentuk dapat dilihat bahwa realisasi FDI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor. Namun pengaruh yang diberikan berbeda-beda di tiap sektor.

**Tabel 2. Model Regresi FDI terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

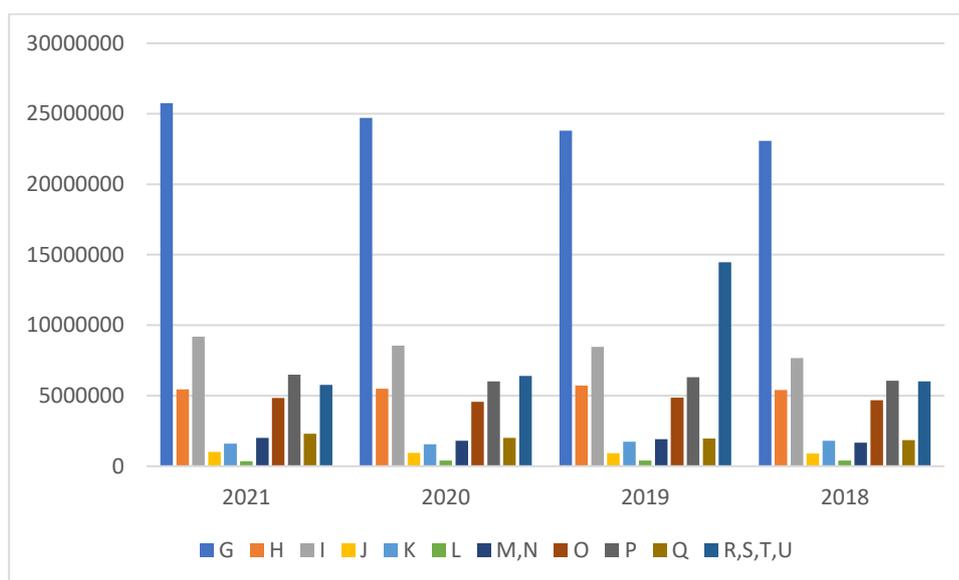
Koefisien	Primer		Sekunder		Tersier	
	Koef.	Prob	Koef.	Prob	Koef.	Prob
$\beta_0$	34,50	0,0000	37,35	0,00	44,31	0,00
$\beta_1$	1,59	0,0104	-0,082	0,00	2,20	0,00
$R^2$	0,74		0,74		0,63	

*Sumber: data diolah*

Di sektor primer dan tersier, realisasi FDI memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap jumlah tenaga kerja di sektor ini. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terjadi peningkatan realisasi FDI di sektor primer dan tersier, maka akan terjadi peningkatan tenaga kerja di sektor ini.

Namun apabila dilihat dari besaran koefisien regresinya, maka dapat dilihat bahwa sektor tersier memiliki koefisien regresi yang lebih besar dibandingkan sektor primer. Hal ini dapat mengindikasikan pengaruh realisasi FDI di sektor tersier terhadap penyerapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan apabila realisasi FDI dilakukan di sektor primer. Gambar 6 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sub-sektor perdagangan (G) menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sub-sektor lainnya. Hal ini dikarenakan dalam industri jasa perdagangan di Indonesia memerlukan banyak tenaga kerja untuk menjadi kasir, pelayan, SPG, dsb. Dimana tenaga kerja yang diperlukan merupakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Hal ini bisa menjadi penyebab lebih tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor tersier dibandingkan dengan sektor primer.

**Gambar 6. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Tersier per Sub-sektor**



Sumber: BPS (2022), diolah

Di sektor sekunder, realisasi FDI memberikan pengaruh yang signifikan negatif. Nilai negatif pada koefisien regresi untuk model regresi ini dapat diartikan bahwa saat terjadi FDI di sektor sekunder, justru akan menurunkan jumlah tenaganya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa FDI yang terjadi di sektor ini sebagian besar berupa mesin atau teknologi baru, yang menghilangkan tenaga kerja yang tidak terampil atau berketerampilan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena SBTC juga terjadi di Indonesia dan sebagian tenaga kerja yang tersedia di Indonesia merupakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah.

#### 4.2 Liberalisasi ekonomi terhadap gini rasio

Model regresi yang diperoleh untuk tenaga kerja per sektor, dan net ekspor terhadap ketimpangan pendapatan berada di tabel 3. Model ini merupakan model terbaik dan telah memenuhi semua asumsi yang diperlukan. Berdasarkan model tersebut dapat dilihat bahwa di ketiga model yang diperoleh net ekspor memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai ekspor dari provinsi-provinsi di Indonesia, maka ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut akan mengalami penurunan *ceteris paribus*.

**Tabel 3. Model Regresi Tenaga Kerja per Sektor, Net Ekspor terhadap Gini Rasio**

Koefisien	Primer		Sekunder		Tersier	
	Koef.	Prob	Koef.	Prob	Koef.	Prob
c	0,392744	0,0000	0,366284	0,000	0,36796	0,0000
Tenaga kerja per sektor	-0,00085	0,0000	-0,00050	0,001	0,00007	0,0095
Net ekspor	-0,00022	0,0002	-0,00138	0,000	-0,00405	0,0000
$R^2$	0,7702		0,7774		0,7834	

Sumber: data diolah

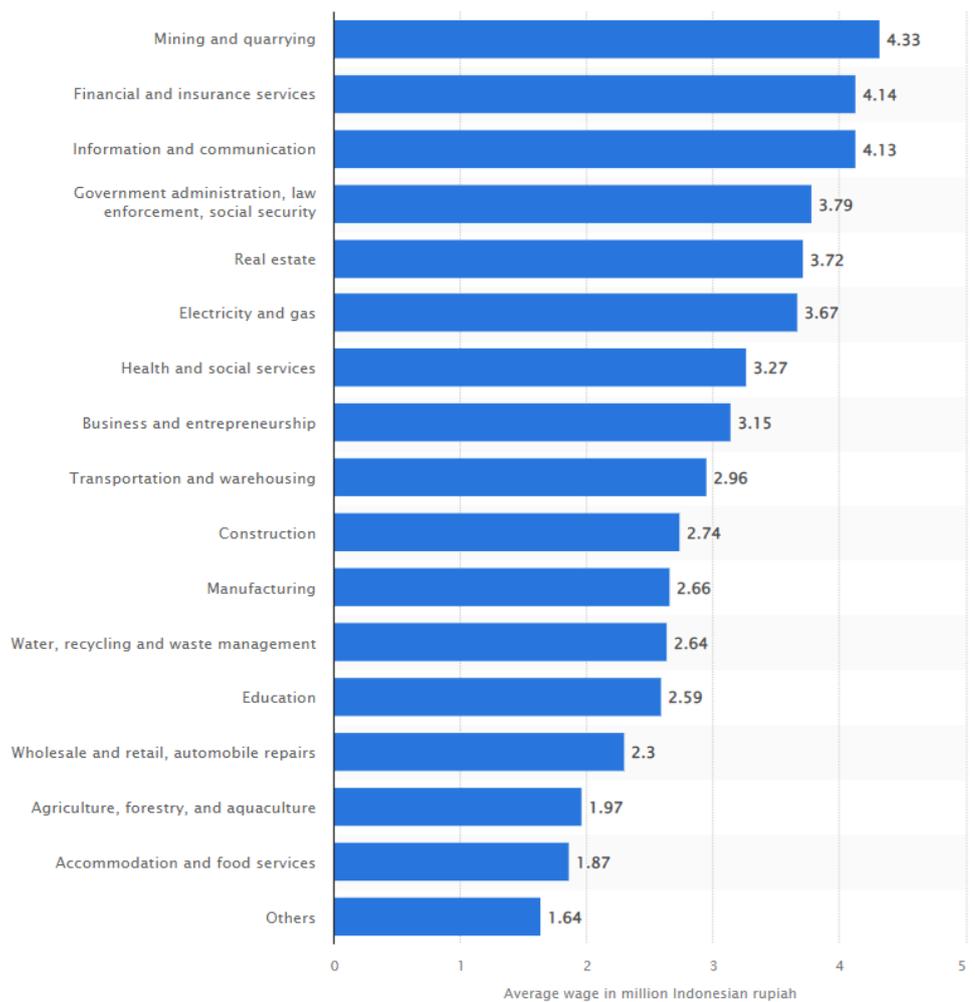
Terjadinya ekspor bersih dari suatu daerah menandakan bahwa daerah itu melakukan ekspor atau penjualan lebih banyak dibandingkan dengan impor yang dilakukan. Saat suatu daerah melakukan ekspor, artinya terjadi proses ekonomi di daerah tersebut. Semakin banyak proses ekonomi yang terjadi, maka akan semakin banyak juga tenaga

kerja yang terlibat. Proses ekonomi yang terjadi di Indonesia tergambar dari Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang pada tahun 2021 berada di level ekspansif.

Namun apabila dilihat kinerja ekspor per provinsi, selama lima tahun terakhir terdapat 13 provinsi yang terus mengalami net ekspor yang negatif. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan net ekspor negatif terbesar. Apabila dilihat dari kinerja import DKI Jakarta pada Tahun 2019 dan 2020, diketahui bahwa Sebagian besar impor di provinsi ini merupakan bahan baku dan bahan penolong industri (BPS, 2022). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perekonomian di Jakarta memiliki hubungan yang cukup kuat dengan perekonomian negara lain. Di satu sisi, kinerja impor dari DKI Jakarta dapat mengindikasikan bahwa perekonomian di provinsi ini berjalan dengan baik, mengingat masih tingginya kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri. Namun di lain sisi, kondisi ini juga perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan industri-industri di DKI Jakarta terhadap bahan baku dari luar negeri. Kondisi ini akan semakin rawan, mengingat saat ini sedang terjadi gangguan rantai pasok global akibat adanya permasalahan geopolitik di Rusia dan Ukraina. Perekonomian di DKI Jakarta akan sangat terpengaruh dengan kondisi global.

Liberalisasi perdagangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya ketergantungan industri dalam negeri pada bahan baku dan bahan penolong yang bersumber dari luar negeri. Hal ini menyebabkan terjadinya net impor yang negatif. Semakin negatif net impor suatu provinsi, maka akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan perekonomian. Hal ini dapat diartikan bahwa saat perekonomian atau industri domestik berkembang, akan menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Hal ini mungkin dikarenakan belum semua tenaga kerja yang tersedia di Indonesia memenuhi syarat kualifikasi. Perusahaan-perusahaan yang ada akan memperkerjakan karyawan dengan keterampilan yang sesuai kualifikasi perusahaan. Namun tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan tidak akan mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya tidak memperoleh pendapatan. Hal ini lah menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan.

**Gambar 4. Rata-Rata Upah Bersih per Bulan di Indonesia pada Agustus 2021 per sektor**



Sumber: Statista (2022)

Berdasarkan model pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa di semua sektor variabel tenaga kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi. Pada sektor primer dan sektor sekunder, pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan ialah signifikan negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak tenaga kerja di sektor primer akan menurunkan ketimpangan pendapatan *ceteris paribus*. Hal ini mungkin terjadi mengingat bahwa rentang upah bagi tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu besar. Gambar 4 menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor primer (*agriculture, forestry, and aquaculture*) berkisar di Rp1,97 juta per bulan. Hal yang sama juga ditunjukkan untuk sektor sekunder. Rentang gaji di sektor sekunder berada pada Rp2,66 juta hingga Rp2,74 juta per bulan (gambar 4). Namun di sektor tersier, peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor ini akan meningkatkan ketimpangan pendapatan yang terjadi. Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa rentang pendapatan dari tenaga kerja di sektor ini cukup besar, yaitu Rp1,87 juta hingga Rp4,33 juta. Tenaga kerja yang berketrampilan rendah akan dibayar dengan upah yang sangat rendah di sektor ini. Namun pekerja yang memiliki keterampilan maka akan memperoleh gaji yang jauh lebih besar. Fenomena ini yang menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di sektor tersier.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Liberalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Liberalisasi keuangan, yang dilihat melalui adanya realisasi FDI, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun pengaruh yang diberikan oleh realisasi FDI berbeda di masing-masing sektor. Di sektor primer dan tersier, realisasi FDI memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Namun di sektor sekunder, realisasi FDI memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal ini dimungkinkan karena terjadi fenomena SBTC, dimana adanya teknologi dan mesin yang baru melengkapi tenaga kerja terampil, namun menghapuskan tenaga kerja tidak terampil. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Indonesia merupakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah.

Liberalisasi keuangan juga secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan realisasi FDI per sektor secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja per sektor. Sedangkan tenaga kerja per sektor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jumlah tenaga kerja di sektor primer dan sekunder memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi. Sedangkan tenaga kerja di sektor tersier memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan rentang upah di sektor terrier jauh lebih besar.

Liberalisasi perdagangan di Indonesia menyebabkan terjadinya ketergantungan industri dalam negeri terhadap perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan terjadinya net ekspor bernilai negatif. Padahal berdasarkan model diketahui bahwa net ekspor memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif di semua sektor. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi net ekspor, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan *ceteris paribus*.

### 5.2 Saran

Fenomena SBTC yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang ada di Indonesia merupakan tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Tenaga kerja ini akan digantikan dengan penggunaan mesin. Pemerintah perlu mencermati fenomena ini dan perlu melakukan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja yang ada.

## Daftar Pustaka

- Abramo, L., & Valenzuela, M. (2005). Women's labour force participation rates in Latin America. *International Labour Review*, 144(4), 369-400.
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive Politics and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 109, Issue 2, 465-490.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. 5 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.

- Blomstrom, M., Kokko, A., & Zejan, M. (2000). *Foreign direct investment: Firm and Host country characteristics*. London: MacMillan.
- Boliaccini, J. A., & Egan, P. J. (2017). Foreign Direct Investment and inequality in developing countries: Does sector matter? *Economic & Politics Wiley*, 209-236.
- BPS. (2022, May 30). *Volume dan Nilai Impor DKI Jakarta dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat, 2019 dan 2020*. Diambil kembali dari [www.jakarta.bps.go.id](http://www.jakarta.bps.go.id): <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2021/03/19/225/volume-dan-nilai-impor-dki-jakarta-dirinci-menurut-jenis-komoditi-di-provinsi-muat-2019-dan-2020.html>
- Braunstein, E. (2006). Foreign direct investment, development and gender equity: A review of research and policy. *Occasional Paper No: UNRISD*. 12.
- Budiyanti, E. (2017). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Kajian Vol. 22 No.1* , 45-57.
- Budiyanti, E. (2017). Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Kajian Vol 22 No. 1 Maret*, 45-57.
- Choi, C. (2006). Does foreign direct investment affect domestic income inequality? *Applied Economic Letters* 13(12), 811-814.
- Daumal, M. (2010, April). *The Impact of trade openness on regional inequality: The cases of India and Brazil*. Diambil kembali dari Dauphine Universite Paris: <https://dial.ird.fr/wp-content/uploads/2021/10/2010-04-The-impact-of-trade-openness-on-regional-inequality-the-cases-of-India-and-Brazil.pdf>
- Derek, R. R., Laoh, O. E., & Jocom, S. (2019). Analisis Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *AGRIRUD Vol. 1 Nomor 2*, 254-264.
- Dreher, A. (2006). The Influence of Globalization on taxes and Social Policy: An Empirical Analysis for OECD Countries. *European Journal of Political Economy*, 22(1), 179-201.
- Evans, P., & Timberlake, M. (1980). Dependence, inequality, and the growth of tertiary: A comparative analysis of less developed countries. *American Sociological Review*, 45(4), 531-552.
- Fatsabit, M. I., & Yusran, H. L. (2019). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan dan Pengaguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi Vol.27 No. 1*, 71-84.
- Fies, N., Fugazza, M., & Maloney, W. (2010). Informal self-employment and macroeconomic fluctuations. *Journal of Development Economics*, 91 (2), 211-226.
- Glaeser EL. (2006). Inequality. (B. R. Weingast, BR, Wittman, & DA, Eds.). New York: Oxford University Press Inc.
- Goldberg, P., & Pavenik, N. (2007). Distributional effects of globalization in developing countries. *Journal of Economic Literature*, 45, 39-82.
- Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2013). *Statistics for the Behavioral Sciences*. New York: Wadsworth Cengage Learning.
- Harrison, A., & Hanson, G. (1999). Trade Liberalization and wage inequality in Mexico. *Industry and Labor Relations Review*, 52(2), 271-288.
- Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D., & Perraton, J. (1999). *Global Transformations*. Palo Alto, CA: Stanford University Press.

- Jaumotte, F., Lall, S., & Papageorgiou, C. (2013). Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization? *IMF Economic Review*, 61, 271-309.
- Jensen, N., & Rosas, G. (2007). Foreign direct investment and income inequality in Mexico, 1990-2000. *International Organization*, 61(2), 467-487.
- Kaiser, U. (2000). New technologies and the demand for heterogeneous labor: Firm-level evidence for the German business-related service sector. *Economics of Innovation and New Technology*, 9(5), 465-486.
- Leamer, E., Maul, H., Rodriguez, R., & Schoott, P. (1999). Does natural resource abundance increase Latin American income inequality? *Journal of Development Economics*, 59 (1), 3-42.
- MacFarland, T. W., & Yates, J. M. (2017). *Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R*. Switzerland: Springer Nature.
- Mankiw, N. (2007). *Makroekonomi (6th ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Meschi, E., & Vivarelli, M. (2009). Trade and Income Inequality in Developing Countries. *World Development*, 37 (2), 287-302.
- Mosley, L. (2011). *Labor right and multinational production*. New York: Cambridge University Press.
- Nugraha, Y. N. (2019, 01 20). *Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Diambil kembali dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>
- Paluzie, E. (2001). Trade Policy and Regional Inequalities. *Papers in Regional Science*, 80 (1), 67-85.
- Park, H. M. (2008). *Univariate Analysis and Normality Test Using SAS, Stata, and SPSS*. Bloomington: The Trustees of Indiana University.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (2021, Juni 2). [www.diskominfo.kaltara.go.id](http://www.diskominfo.kaltara.go.id). Diambil kembali dari Pemprov Bertekad Tingkatkan Kualitas Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah: <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/pemprov-bertekad-tingkatkan-kualitas-pengawasan-akuntabilitas-keuangan-dan-pembangunan-daerah/>
- Reuveny, R., & Li, Q. (2003). Economic openness, democracy, and income inequality: An empirical analysis. *Comparative Political Studies*, 36 (5), 575-601.
- Rodrik, D. (1998). Has Globalization gone too far? *Institute for International Economics, Challenge*, vol.41, no. 2, 81-94.
- Rosser, J., Rosser, M., & Ahmed, E. (2003). Economic openness, democracy, and income inequality: An empirical analysis. *Comparative Political Studies*, 36 (5), 575-601.
- Salim, H.S, dan Sutrisno, Budi, 2018, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar(3rd ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sultan, & Jamzani. (2010). Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Periode 2000-2004. *Buletin Ekonomi Vol.8 No.1*, 1-70.
- Sutarno, & Kuncoro M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No.2*, 97-110.
- Syamsul. (2020). Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sualwesi Tengah Tahun 2014-2018. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 05 No. 01*, 47-66.
- TeVelde, D. (2004). Foreign direct investment, skills and wage inequality in East Asia. *Journal of the Asia Pasific Economy*, 9(3), 348-369.
- Triatmojo, D. (2021, Maret 27). *Kemnaker: 29,4 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19, di-PHK Hingga Dirumahkan*. Diambil kembali dari [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com): <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/03/27/kemnaker-294-juta-pekerja-terdampak-pandemi-covid-19-di-phk-hingga-dirumahkan>
- UNCTAD. (2004). *World Investment Report*. New York: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. (2012). *World Investment Report*. New York: United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. (2022, Mei 31). *Foreign direct investment: inward and outward flows and stock, annual*. Diambil kembali dari [www.unctadstat.unctad.org](http://www.unctadstat.unctad.org): <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableView/tableView.aspx?ReportId=96740>
- Wiguna, A. T., & Panennugi, M. A. (2019). Dampak Keterbukaan Perdagangan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia Vol.19 No.1*, 49-61.
- Wood, A. (1994). *North-south trade, employment, and inequality: changing fortunes in a skill-driven world*. London: Clerendon Press.
- World Inequality Database. (2022, Mei 26). *Word Inequality Database*. Diambil kembali dari [www.wid.com](http://www.wid.com): <https://wid.world/data/>